

KONSEP SOSIOLOGI ISLAM TENTANG KONFLIK SOSIAL

¹Mahmud Thohier

¹Fakultas Dakwah Unisba Bandung Jl. Ranggagading no.8 Bandung
e-mail: mahmudthohier@gmail.com

Abstrak. Sifat kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga menyimpan potensi maupun faktor disharmoni. Pandangan umum yang telah lama dipopulerkan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah, serta akomodatif terhadap berbagai nilai budaya asing dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, tentu dapat dikatakan bahwa potensi konflik dan budaya kekerasan yang muncul terlihat relative sama kuatnya dengan budaya keramah-tamahan bangsa ini. Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya bisa juga dikatakan berbanding terbalik dengan sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asumsi yang berlaku mestinya, sikap religius dapat mencegah timbulnya konflik yang semestinya tidak perlu. Atau jika konflik berkembang pada skala kecil tentunya religiusitas ini bisa menjadi penyejuk dan unsur pendamai pertikaian antar kelompok tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak konflik yang terjadi justru dibangun dengan mengatasnamakan agama. Ada beberapa etika yang harus dipegangi demi terwujudnya integritas sosial. Pertama, tidak boleh merasa benar sendiri, karena kebenaran mutlak adalah milik Allah dan kebenaran manusia bersifat relatif. Kedua, perlu ditegakkan sikap-sikap toleransi (tasamuh), saling menghormati, tidak menghina pihak lain. Ketiga, perlu dikembangkan sikap berbaik sangka (husnul al-dzan), bersikap positif, yaitu menilai pihak lain yang berbeda secara proporsional, dan Keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekuasaan.

Kata kunci: Sosiologi Islam, Konflik Sosial

1. Pendahuluan

Konflik merupakan keadaan dimana masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya, dan melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial serta menilai keteraturan dalam masyarakat itu hanyalah di sebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sentral dari teori ini adalah wewenang dan posisi. Intitesisnya bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi factor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Kekuasaan dan wewenang yang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur, karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Ralf Dahrendorf sebagai: persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (imperatively coordinate associations [G. Ritzer, 2009:26])

Teori konflik Karl Marx. Karl Marx mendasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (Borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas Proletar. Kedua kelas ini berada dalam

suatu struktur sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Kelas menengah yang secara “geneologis” mempunyai afiliasi kepentingan dengan kedua kelompok itu. Posisi kelas tengah ini tidak begitu jelas, bahkan dalam bagian tertentu menjadi agen bagi para pemilik modal, tetapi juga sekaligus mediator dan pembela kepentingan rakyat (S. Jurdi, 2010, hal. 254-255).

Teori konflik Ralf Dahrendorf. Bahwa konflik merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pemilikan dan Kontrol sarana- sarana berada dalam satu individu- individu yang sama. Menurut Dahrendorf tidak selalu pemilik sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol apalagi pada abad kesembilan belas. Bentuk penolakan tersebut ia tunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad kesembilan belas: a) Dekomposisi modal. Menurut Dahrendorf timbulnya korporasi-korporasi dengan saham yang dimiliki oleh orang banyak, dimana tak seorangpun memiliki kontrol penuh merupakan contoh dari dekomposisi modal. b) Dekomposisi Tenaga kerja. Di abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seorang atau beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti halnya seseorang atau beberapa orang yang mempunyai perusahaan tapi tidak mengendalikannya. Karena zaman ini adalah zaman keahlian dan spesialisasi, manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai untuk memimpin perusahaannya agar berkembang dengan baik (Ralf Dahrendorf, 1959: 142-189).

Teori konflik Lewis A. Coser. Dalam membahas berbagai situasi konflik Coser membedakan konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser (1956: 72) menjelaskan, dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Dalam satu situasi bisa terdapat elemen-elemen konflik dan non-realistis. Konflik realistis khususnya dapat diikuti oleh sentiment-sentimen yang secara emosional mengalami distorsi oleh karena pengungkapan ketegangan tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik yang lain.

Efek dari teori adalah, pada akhir abad kesembilan belas, lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, di mana para buruh terampil berada di jenjang atas sedang buruh biasa berada di bawah. Hubungan-hubungan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran kelas (terampil) itu, tetap terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastis, tetapi pada dasarnya masih terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang berkuasa dan yang dikuasai (Ralf Dahrendorf, 1968: 56-89).

2. Faktor faktor Konflik Sosial

Dalam sejarah agama-agama, kekuatan agama di satu sisi dan kekuatan agama di sisi lain seringkali terjadi ketegangan dan saling berhadapan. Misi agama Ibrahim

menghancurkan bangunan politik Raja Namrud yang establish. Dakwah Nabi Musa meneggelamkan Fir'aun (Ramses II) beserta pengikutnya ke dasar laut merah. Demikian juga kebangkitan Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi mengakhiri hegemoni politik kaum Quraisy. Bahkan pada akhirnya mampu menjadi negara "adikuasa" menggantikan dua super power di barat Imperium Romawi dan super power di Timur kerajaan Persia Raya.

Fenomena ketegangan antar agama dan politik ini telah menjadi kenyataan di Eropa pada abad pertengahan, ketika gereja dianggap menjadi penghalang proses modernisasi. Atas dasar ini cendekiawan barat umumnya begitu yakin bahwa persoalan politik dan modernisasi harus dipisahkan dengan persoalan agama, yang kemudian populer dengan istilah sekularisasi (Donald K. Emmerson, 1976: 107).

Keberhasilan Islamisasi di Indonesia, salah satu faktor pendukungnya adalah justru penjajah Belanda. Gencarnya perlawanan kaum Muslimin terhadap Belanda yang dicap sebagai "bangsa kafir" mendorong Belanda untuk mengubah strategi pendekatan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari umat Islam. Tiga strategi yang diterapkan yang sekarang ini dirasakan pengaruhnya adalah; pertama, berusaha memisahkan urusan agama dengan politik, yang disebut dengan sekularisasi; kedua, berusaha memanfaatkan agama dan para tokohnya untuk mendukung dan sebagai justifikasi segala kebijakan yang ditempuh, ketiga, fungsi sebagai missionaris Kristen dilakukan secara samar dan persuasif (Donald K. Emmerson, 1976: 129).

Cita-cita reformasi untuk mewujudkan masyarakat madani dan berkeadilan dan demokratis, agaknya masih jauh dari harapan. Kemelut politik dan keamanan di tanah air pasca Orde Baru belum mampu di atasi secara baik. Hal ini terbukti dengan masih sering munculnya berbagai gejolak sosial di beberapa daerah, berupa unjuk rasa dan bahkan meningkat menjani kerusuhan dan kekerasan. Ini semua menunjukkan bahwa ruwet masalah yang harus dihadapi.

Aksi-aksi kekerasan massa yang bermotifkan agama dan SARA menjadi tema dan model. Agama-agama memeing mengajarkan kepada umatnya kerukunan dan kedamaian hidup. Tetapi dalam implementasinya, keberagaman muncul dalam bentuk fanatisme sempit, ditambah dengan upaya-upaya politisasi agama yang marak pada era Multi partai sekarang ini. Faktor-faktor pemicu konflik tersebut adalah:

Pertama; adanya pertarungan amatir antar kekuatan untuk dapat masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat berbentuk Parpol, Ormas, dan LSM sertadapat bersifat perorangan, seperti para elite polotik, eliteorimordial yangdekat dengan kekuasaan, dan sebagainya. Pertarungan antar kekuatan inilah potensial terjadinya konflik massa.

Kedua; media informasi yang bebas dan hampir-hampir out of control juga dapat medorong ke arah disintegrasi. Seringkali opini politik dibangun, didesain sedemikian rapi untuk sarana-sarana tertentu. Demikian juga pemberitaan yang kurang obyektif dan memihak akan turut mempengaruhi pendapat umum. Pemberitaan vulgar dan tidak selektif, akan membangkitkan semangat "meniru".

Ketiga; adanya intervensi pihak asing baik langsung maupun terselubung. Secara langsung kita melihat betapa kuatnya pengaruh IMF dan desakan negara-negara maju terhadap Indonesia. Umumnya pihak asing mempunyai misi mengarahkan Indonesia menjadi negara yang tak berdaya dan selalu tergantung kepada pemberian-pemberian yang tidak imbang, NGO dan infiltrasi yang bertujuan melakukan proses pembusukan dari dalam. Saat ini juga banyak LSM yang berpikir sepihak untuk mencari keuntungan

ekonomi. Gejala lain yang terus harus diwaspadai adalah, mengalirnya barang haram, psikotropika (NARKOBA) yang turut memperkeruh dan merusak moral bangsa.

Keempat; keresahan masyarakat lapis bawah yang merasa ditinggalkan oleh para elite politik yang dulu memberi janji-janji manis, setelah Pemilu usai mereka kecewa. Para elite politik dan pemimpin massa, kini sibuk mengurus kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Rakyat kecil merasa hanya diperalat dan digerakkan untuk memenangkan salah satu parpol saja, tanpa ada perubahan nasib yang signifikan.

Kelima; adanya fenomena budaya yang kontradiktif sedang terjadi, antara budaya feodalistik otoritarian pengikut status quo, dengan budaya demokratis yang sedang berkembang. Sebagian masyarakat masih menggambarkan masa lalu lebih baik daripada masa kini, atau masa depan. Mereka tidak sabar dan tidak tahan melihat perubahan-perubahan yang sedang terjadi saat ini, bahkan cenderung menolak dan menyalahkan apa yang terjadi.

Keenam; yakni proses pemiskinan dan tekanan ekonomi yang kian sulit pada masyarakat kelas bawah. Kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan menjadi pemicu terjadinya revolusi sosial. Banyaknya penggunaan dan menurunnya pendapat masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh dan lain-lain akan melahirkan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan memunculkan kecemburuan sosial.

3. Agama (Islam) sebagai Ajaran Kedamaian

Agama dan kekerasan tentu merupakan dua hal yang paradok. Semua agama tentu mengajarkan kepada umatnya tentang kerukunan, kedamaian, keadilan, toleransi (tasamuh) dalam keberagaman, saling menghormati dan menghargai sesame. Ajaran agama memberikan arah untuk mewujudkan pribadi yang paripurna (insan kamil), berpikir positif. Agama dan akal sehat akan menghindari sejauh mungkin konflik dan perpecahan dalam umat, terlebih disertai dengan tindak kekerasan.

Ajaran Islam sangat menganjurkan semua pemeluknya untuk senantiasa hidup rukun, bersatu dan tidak terpecah belah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an '“Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai ...” (Q.S. Ali Imran, 3: 103). Di dalam ayat lain dinyatakan pula bahwa manusia adalah umat yang satu (Ummatan wahidah), “Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan” (Q.S. al-Baqarah: 213).

Pernyataan Al-Qur'an bahwa manusia adalah umat yang satu dan tidak terpecah-pecah diulang-ulang dalam berbagai tempat dengan konteks yang berbeda (Q.S. Yunus: 19, al-Anbiya:92). Al-Qur'an juga menyatakan bahwa manusia –apapun jenis kelamin dan status sosialnya- diciptakan dari jenis yang sama (min nafs wahidah [Q.S. al-Nisa: 1]). Atas dasar prinsip inilah, maka interaksi manusia dengan sesamanya harus didasari keyakinan, bahwa semua manusia adalah bersaudara, apalagi sesama muslim.

Kerukunan dan persaudaraan di dalam istilah Islam disebut dengan “ukhuwwah”, yang berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Arti saudara sebangsa walau tidak seagama, seperti pada Q.S. al-A'raf: 65. sedangkan dalam bentuk jama'-nya, adakalanya “ikhwan” sebanyak 7 kali digunakan untuk makna persaudaraan seketurunan (Quraish Shihab, 1995 : 357).

Ukhuwwah dalam arti asalnya, yaitu persamaan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam beberapa ayat maupun hadits Nabi, maka ukhuwwah dapat diklasifikasikan dalam empat tingkatan, sebagai berikut:

Ukhuwwah fi al-'Ubudiyyah, yaitu ukhuwwah yang dibangun atas dasar persamaan se-mahluk. Manusia, binatang, tumbuhan dan alam semesta adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah, yang oleh karenanya harus dapat hidup berdampingan.

Ukhuwwah fi al-Insaniyyah/Basyariyyah, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan kemanusiaan. Manusia berasal dari keturunan yang sama, mempunyai bentuk fisik yang sama, diberikan potensi dasar yang sama, akal dan perasaan. Dari persamaan-persamaan inilah, sesama manusia harus hidup bersaudara dan saling membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Dan persaudaraan basyariyyah tidak membedakan batas-batas agama, warna kulit, budaya, partai politik, status sosial dan sebagainya. Jadi ukhuwwah jenis ini dibangun atas prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal (Q.S. al-Hujarat: 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Ukhuwwah fi al-Wathaniyyah wa al-Nasb, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan-persamaan sebangsa (tanah air) dan seketurunan (suku). Ukhuwwah Wathaniyyah termanifestasikan dalam bentuk-bentuk; cinta tanah air, rasa memiliki dan mempertahankannya, yang sering disebut dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme ini juga dibenarkan oleh Islam. Sabda Nabi "hubb al-wathan min al-iman" (نم ن طولا بح) nanurutekes naaraduasrep nakgnadeS .(nami irad naigabes halada ria hanat atniC) (لاي مان) akan melahirkan "nepotisme", yaitu perasaan ingin mendahulukan kerabat dari orang lain yang bukan kerabat. Nepotisme yang dilarang adalah bentuk-bentuk mendahulukan dan memproteksi keluarga dengan cara yang tidak adil, pilih kasih, dan merampas hak-hak orang lain yang bahkan keluarga. Ukhuwwah jenis ini cakupannya lebih sempit, namun ikatan atau fanatismenya lebih kuat.

Ukhuwwah fi al-Din al-Islam (Islamiyyah), yaitu persaudaraan yang dibangun atas persamaan seagama Islam. Ungkapan "Sesama muslim adalah saudara" adalah prinsip Islam yang sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur'an (Q.S. al-Hujurat: 10, at-Taubah: 71), maupun dalam hadits Nabi, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan mereka, belas kasihan mereka, dan kelembutan mereka adalah bagaikan satu badan. Apabila salah satu dari anggota badan itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan, sehingga tidak bisa tidur dan terasa panas" (HR. Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586).

Berbagai jenis dan tingkatan Ukhuwwah ini dalam pelaksanaannya harus saling menguatkan. Tidak boleh mengatasnamakan Ukhuwwah Islamiyyah, jika misalnya dalam pelaksanaannya mengganggu Ukhuwwah Wathaniyyah tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan kemanusiaan, dan sejenisnya. Islam menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu, tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan terhadap orang-orang non-muslim (Q.S. Ali 'Imran: 64; Saba': 24-25).

Oleh karena itu, Allah membekali nilai-nilai moral pada setiap makhluk dalam kepentingan-kepentingannya sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka mereka pun dibekali oleh Allah dengan kemampuan untuk berkonflik, baik dalam fisik, roh maupun akalnya, dan sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah hikmah di balik terjadinya konflik. Dalam Islam, konflik bukanlah sebagai tujuan; ia sebagai sarana untuk memadukan antara berbagai hal yang saling bertentangan untuk membebaskan kehidupan manusia dari kepentingan individual dan dari kejelekan-kejelekan, sehingga secara berimbang mereka dapat dibawa menuju ke jalan yang terang. Dalam al-Qur'an, Allah berfirman, yang artinya:

لَمِيزًا لَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.....

“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (QS. 2:251).

Timbulnya gejala konflik dalam rangka meningkatkan taraf hidup, baik dalam skala makro maupun mikro, adalah sebuah keharusan. Selain itu, etika (akhlak) dalam mewujudkan cita-cita tersebut harus selalu diperhatikan dengan penuh antisipasi, karena dengan bekal ini pergolakan apapun dengan corak bagaimanapun akan dapat dikendalikan dengan baik, dan dengan sendirinya akan dapat medatangkan kondisi yang lebih baik (masalah).

Islam memandang bahwa persoalan di atas sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk merealisasikan konsep amar ma'ruf nahi munkar (3:110), yang disebut oleh Imam Abu Hamid Al Ghazali sebagai kutub terbesar agama (Islam). Ironisnya, kewajiban tersebut dalam prakteknya justru dilupakan, bahkan dihapuskan. Islam tidak mematikan insting alamiah manusia, tetapi lebih bagaimana mereregulasi insting alamiah tersebut sehingga unsur-unsur destruktifnya bisa diminimalisir. Islam hadir sebagai antitesis dari sistem kepercayaan dan struktur sosial politeistik, Islam tidak pernah lepas dari konflik. Konflik antara masyarakat politeis Mekkah dengan Umat Islam semakin hari semakin tajam. Kekerasan demi kekerasan yang menimpah Umat Islam awal yang kemudian memaksa Nabi untuk melakukan migrasi (hijrah) ke Yatsrib (Madinah).

Di Madinah ada tiga kelompok sosial, yaitu: pertama, kaum muslim, kaum Yahudi, dan kaum politeis Arab. Kaum muslim terdiri dari para pengungsi yang berasal dari Mekkah dan kelompok Anshar yakni orang-orang Yatsrib yang menerima Islam yang merupakan gabungan dari suku Auz dan Khazraj. Jenis struktur sosial ini asing bagi tradisi-tradisi kuno di Semenanjung Arab. Dalam tradisi Arab saat itu, organisasi sosial sangat bergantung pada ikatan darah dan kekerabatan, sementara di Madinah pertama kalinya, orang-orang yang berasal dari asal geografis, suku dan latarbelakang budaya yang berbeda secara totalitas bekerja sama dan mengidentifikasi diri sebagai satu kelompok sosial tertentu. Suhail dari Roma, Salman dari Persia, dan Gavan dari Kurdi dimasukkan dalam kelompok ini (dalam: Charles Kurzman (Ed.), (2003).

4. Kesimpulan

Sebagai simpulan, bahwa dalam ajaran Islam, meskipun tidak diturunkan aturan-aturan rinci dalam mu'amalah namun diberikan petunjuk yang jelas tentang etika-etika yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menghadapi perbedaan golongan dan perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat internal (interen umat beragama) maupun eksternal (antar umat beragama) agar tidak berimplikasi negatif, maka perlu ditegakkan beberapa prinsip dan etika.

Hikmah diciptakannya perbedaan ini, agar hidup menjadi dinamis dan berkembang, masing-masing mempunyai identitas, agar bisa saling mengukur dan berkompetisi secara sehat. Dalam Islam, perbedaan pendapat dan lahirnya golongan-golongan sudah mulai muncul pada masa Khulafah ar-Rasyidin dan terus berkembang pada periode-periode berikutnya. Dalam bidang teologi, misalnya, lahir kelompok Syi'ah, Khawarij, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Zhahiri, dan sebagainya.

Menghilangkan perbedaan adalah hal yang mustahil, karena bertentangan dengan sunnat Allah. Yang penting adalah, menegakkan etika berbeda pendapat agar dapat hidup rukun dan aman. Ada beberapa etika yang harus dipegangi demi terwujudnya integritas sosial. Pertama, tidak boleh merasa benar sendiri, karena kebenaran mutlak adalah milik Allah dan kebenaran penemuan manusia bersifat relatif. Kedua, perlu ditegakkan sikap-sikap toleransi (tasamuh), sikap "tepo-seliro" saling menghormati, tidak mengejek dan menghina pihak lain yang berbeda.

Ketiga, perlu dikembangkan sikap baik sangka (husnul al-dzan), bersikap positif, yaitu menilai pihak lain yang berbeda secara proporsional dari sisi kekurangan dan kelebihan, Keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Agus Maladi Irianto & Mudjahirin Thohir, 2000. *Membangun Rasa Damai di Atas Bara* (Semarang: Lirid)
- Ahmad Suaedi (ed.), 2000. *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta: Grasindo)
- Ali Bulac, (2003). *Piagam Madinah dalam: Charles Kurzman (Ed.), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina.
- Alwi Shihab, Dr., 1999. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan)
- Bernard Raho, (2007). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Donald K. Emmerson, 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politic*, (Ithaca: Cornell University Press)
- Fred. Schwarz, (1960). *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs.
- George Ritzer, (2009). *Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lewis Coser (ed), 1965. *George Simmel*. Eaglewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Lewis Coser, 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Lewis Coser, 1967. *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Margaret. M. Poloma, 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Quraish Shihab, 1995. *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet IX)
- Muhammad Husain Haikal, 1990. *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Lentera Antarnusa)

- Nasikun, Dr., 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada)
- Nurcholis Majid, 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina)
- R.H.A. Soenarjo, S.H., 1994. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al Qur'an)
- Rachmad K. Dwi Susilo, (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media
- Ralf Dahrendorf, 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Calif.: Stanford University Press.
- Ralf Dahrendorf, 1968. *Essays in the Theory of Society*, Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Sudirman Tabba, 1993. *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,).
- Tom Bottomore, dkk. 1979. *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*. Victoria: Penguin Books.

